

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercapainya pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pembiayaan atau keuangan pendidikan. Pembiayaan atau keuangan berhubungan erat dengan pelaksanaan pendidikan terutama dalam memenuhi kebutuhan yang mendukung terselenggaranya program pendidikan secara efektif dan efisien.¹

Setiap penyelenggaraan pendidikan ini membutuhkan adanya biaya atau uang untuk dapat terselenggaranya suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Uang digunakan untuk membayar keperluan kegiatan-kegiatan madrasah, seperti tenaga pendidik, karyawan, membangun gedung, ekstrakurikuler, operasional madrasah, mengadakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran dan kebutuhan pendidikan.

Dalam penyelenggaran pendidikan, pembiayaan merupakan bagian dari standar pendidikan yang juga tidak terpisah dari kajian manajemen pendidikan. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dijelaskan lingkup delapan standar yang telah ditetapkan dalam BAB II Pasal 2 ayat 1 meliputi: Standar isi, standar proses, standar

¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Madrasah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 167

kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.²

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ari Sandi Setiawan dan kawan-kawan, menyebutkan bahwa: “Kualitas praktik pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagian pembiayaan pendidikan. Pendidikan tidak lepas dari penggunaan dana atau pengeluaran dalam penyelenggaraan pendidikan, maka lembaga pendidikan harus mengutamakan pengelolaan biaya tersebut agar dapat dialokasikan sesuai dengan pendapatan”.³

Kemampuan madrasah/madrasah pada masa ini dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan atau pembiayaan pendidikan. Pengelolaan tersebut bisa dimulai dengan menyusun rencana, penggunaan, sampai kepada pemeriksaan dan pertanggungjawaban secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Dana pembiayaan pendidikan pada madrasah merupakan produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, semua program yang dilaksanakan madrasah membutuhkan biaya, baik biaya kecil maupun besar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 80 ayat 1 yang berbunyi: “Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

³Ari Sandi Setiawan, Ismet Basuki, Erny Roesminingsih. “Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya”. *Surabaya State University* 7, no. 3 (2019), h. 442

pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari negara”.⁴ Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat menikmati pelayan pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Upaya dalam melaksanakan pendidikan khususnya pada lembaga madrasah terutama dalam proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai tujuan, maka memerlukan pengelolaan biaya yang optimal. Manajemen biaya pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan di Madrasah. Beragam sumber dana yang dimiliki oleh madrasah, baik yang mengalir masuk dari pemerintah harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang profesional dan jujur.

Namun pada praktiknya pada lembaga madrasah masih banyak yang belum secara efektif dalam mengelola keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan. Kelemahan mendasar pada lembaga madrasah tertentu terletak pada bidang manajemen dan ketatalaksanaan. Ketersediaan anggaran dana tidak semua berbanding lurus dengan tercapainya tujuan pendidikan.⁵

Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan.⁶ Permasalahan

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31

⁵ Feiby Ismail, dan Nindy Sumaila, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Pengelolaan dan Bantuan Operasional Madrasah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *Managerial: jurnal manajemen pendidikan Islam*. Vol. 5, No. 1, 2020, h. 3

⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Islam, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 256

dana pendidikan menjadi salah satunya dan tidak semua lembaga pendidikan bisa mengelola keuangan atau dana pendidikan dengan baik. Sebab sejatinya uang yang dikelola harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pemenuhan standar pendidikan.

Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pendidikan yang tidak dapat dipisah dari pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Madrasah Ibtidaiyah swasta, seperti MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Shiratul Jannah, dan MIS Darul Ulum Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, merupakan lembaga pendidikan di bawah pembinaan dan pengawasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan yang keadaanya cukup memberikan kontribusi bagi keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sebagai Madrasah swasta, sistem pengelolaan pembiayaan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Shiratul Jannah, dan MIS Darul Ulum, tentunya memiliki perbedaan dibandingkan lembaga-lembaga madrasah yang lain, terutama madrasah-madrasah negeri.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Shiratul Jannah, dan MIS Darul Ulum masih dapat mempertahankan madrasahnyanya serta memberikan layanan sebaik mungkin meskipun memiliki keterbatasan pembiayaan pendidikan. Ketiga madrasah ini memiliki lokasi yang berbeda-beda. MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah sebagai madrasah yang berada di Kota Buntok, MIS Darul Ulum Berada di Desa Bangkuang, dan MIS Shiratul Jannah berada di Desa Baru. Ketiga madrasah ini melaksanakan pendidikan hanya

dengan bantuan pemerintah, yaitu dari dana BOS. Meskipun dengan satu sumber pemasukan, ketiga madrasah ini mampu mempertahankan dan melaksanakan kegiatan pendidikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala madrasah, meski dana yang diterima untuk menunjang pendidikan hanya dari dana BOS dan tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan yang mengharuskan masing-masing lembaga lebih kreatif dalam memanfaatkan dan mengalokasikan dana tersebut. Dengan keterbatasan yang ada, ketiga madrasah ini masih bisa tumbuh dan melaksanakan tujuan pendidikan secara optimal.

Untuk mencapai hal tersebut, salah satunya diperlukan adalah pengelolaan pembiayaan melalui sebuah manajemen yang baik untuk menyelenggarakan pendidikan serta bagaimana madrasah mengelola dana untuk mencapai tujuan pendidikan. Terkait pentingnya suatu pelaksanaan pengelolaan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Maka disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. As-Shaff ayat 4:⁷

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرْصُوصًا (٤)

Manajemen pembiayaan harus sungguh-sungguh dan perlu kecermatan dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan agar tetap lebih baik dan berjalan sesuai rencana terutama dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk melaksanakan pendidikan yang baik, maka para pemangku kepentingan dalam biaya pendidikan perlu melakukan pengelolaan secara optimal.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

Oleh karena itu, langkah pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan berjalannya proses kegiatan belajar yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah (Studi Multisitus Di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah).

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian di sini bermaksud untuk membatasi permasalahan yang dibahas, sehingga masalah-masalah tersebut menjadi terarah dan jelas. Sebagaimana latar belakang di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah tentang manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama’ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah yang meliputi:

1. Proses penyusunan anggaran (*budgeting*) pembiayaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ahlusunnah Wal Jama’ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah.
2. Proses pembukuan (*accounting*) pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ahlusunnah Wal Jama’ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah.
3. Proses pemeriksaan (*auditing*) pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ahlusunnah Wal Jama’ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah.

C. Tujuan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada fokus penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendiskripsikan proses penyusunan rencana anggaran pembiayaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah.
2. Mendiskripsikan proses pembukuan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah.
3. Mendiskripsikan proses pemeriksaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan khazanah keilmuan terkait pengelolaan pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah.
 - b. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian tambahan dalam manajemen pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi kepala Madrasah dalam membuat penyusunan rencana anggaran, pembukuan dan pemeriksaan yang mendukung strategi administrasi.
- b. Dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam pelatihan Kepala Madrasah, terkait dengan penyusunan rencana anggaran, pembukuan dan pemeriksaan yang baik dan benar.

E. Definisi Operasional

Untuk membatasi kesalahan penafsiran pada penelitian ini maka diberikan definisi operasional sebagai batasan dan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun definisi operasional yang dimaksud sebagai berikut:

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkaitan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di madrasah atau lembaga. Kegiatan yang ada dalam konteks ini meliputi proses penyusunan anggaran, proses pembukuan dan proses pemeriksaan pembiayaan. Adapun beberapa istilah tersebut, sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan anggaran pendidikan (*budgeting*) adalah kegiatan merencanakan atau menetapkan anggaran biaya yang menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu

tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai pemjabaran suatu rencana ke dalam bentuk atau setiap komponen tertentu. Dengan demikian proses penyusunan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan merencanakan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu untuk menunjang pendidikan yang mendukung potensi peserta didik dan tercapainya tujuan pendidikan di madrasah.

- b. Proses pembukuan pembiayaan pendidikan (*accuonting*) adalah kegiatan menghitung data pembiayaan, pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya laporan pembiayaan proses pembelajaran yang mendukung lembaga pendidikan madrasah. Dengan demikian proses pembukuan yang dimaksud adalah kegiatan menghitung, pencatatan, dan sebagai hasil akhir laporan pembiayaan proses pembelajaran yang mendukung terlaksananya pendidikan yang ingin dicapai.
- c. Proses pemeriksaan pembiayaan pendidikan (*Auditing*) adalah proses pemeriksaan merupakan kegiatan yang menyangkut pemeriksaan terkait penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan keuangan yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian proses pemeriksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang menyangkut periksaan, pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang dalam proses pembelajaran yang mendukung terlaksananya pendidikan yang ingin dicapai.

2. Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah Ibtidaiyah swasta pada khususnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat, yayasan atau pihak madrasah sendiri. Madrasah Ibtidaiyah swasta yang dimaksudkan adalah MIS Ahlusunnah Wa Jama'ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah. Madrasah Ibtidaiyah swasta di sini sistem pengelolaannya pembiayaan diserahkan kepada kepala madrasah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian di sini, peneliti ingin meneliti tentang manajemen pembiayaan yang memfokuskan pada proses penyusunan anggaran, proses pembukuan dan proses pemeriksaan pembiayaan di MIS Ahlusunnah Wa Jama'ah, MIS Darul Ulum, dan MIS Shiratul Jannah.

F. Penelitian Terdahulu

Zainudin Latif, 2019, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Swasta (Studi Multisitus Di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar Dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar)*.⁸ Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Kediri. Hasil penelitian menunjukkan tentang manajemen pembiayaan madrasah swasta yang kesimpulannya meliputi: 1) perencanaan pembiayaan di SD Islam Lukmanul Hakim Blitar dan SD Tarbiyatul Falah dilakukan dengan menetapkan rencana yang menjadi proses, mengacu pada peraturan pemerintah, perhitungan cermat,

⁸Zainudin Latif. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Swasta (Studi Multisitus Di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar)*. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Kediri. (2019).

mengoptimalkan sumber daya dan diformulasikan dengan jelas. 2) akuntabilitas pembiayaan pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan besarnya anggaran pembiayaan, hingga menjadi 100% atau mendekatinya, mengacu pada perencanaan yang ada dan terjaganya mutu madrasah. 3) pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh yayasan, komite madrasah, UPTD pendidikan.

Zaini, 2020, jurnal dengan judul *Kreativitas Manajemen Pembiayaan pendidikan pada Madrasah Marjinal di Kota Banjarmasin (Studi Multikasus pada MI Darul Huda Kuin dan MI Al-Istiqamah Pekapuran)*.⁹ Fokus penelitian ini membahas tentang perencanaan pendidikan, penggunaan dana pendidikan, efektivitas, dan efisiensi dan pendidikan, *fundrising* dan pendidikan, akuntabilitas dana pendidikan di madrasah. Hasil penelitian manajemen pembiayaan pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al-Istiqamah meliputi, perencanaan, pemanfaatan sumber dana efektivitas, dan efisiensi pendidikan, dan *fundrising* pendidikan, akuntabilitas dana pendidikan.

Fakarotul Karimah, 2018, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (studi kasus di MI Tahfidz Ash-Habul Khafi Ngawi)*.¹⁰ Hasil penelitian ini memfokuskan kepada kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian pelaksanaan pembiayaan

⁹Zaini, *Kreativitas Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah Marjinal Di Kota Banjarmasin (Studi Multikasus Pada MI Darul Huda Kuin dan MI Al-Istiqamah Pekapuran)*. *Antasari Jurnal Of Islamic Education*, Vol. 3 (06), 2020.

¹⁰ Fakarotul Karimah. *Tesis: Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (studi kasus di MI Tahfidz Ash-Habul Khafi Ngawi)*. (Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2018).

pendidikan (*actuating*) sebagai proses implementasi pembiayaan pendidikan melibatkan pelaksana bertindak sesuai perencanaan dengan petunjuk teknis BOS, pentingnya orientasi dan menggerakkan operator. Mutu pendidikan Islam menjadi sarana pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena pemenuhan sarana penunjang pendidikan serta pembelajaran.

Pipin Desniati, 2019, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor*.¹¹ Hasil penelitian ini menguraikan tentang deskripsi manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 10 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menemukan beberapa temuan, yaitu: *Pertama*, dari aspek implementasi perencanaan sistem manajemen pembiayaan pendidikan, kebijakan sistem pembiayaan pada Pondok Pesantren Darul Muttaqien dirancang oleh pimpinan pondok pesantren yang terdiri dari ketua yayasan, wakil pimpinan pondok, dan bendahara pondok. *Kedua*, aspek pelaksanaan sistem pembiayaan Pondok Pesantren Darul Muttaqien mulai berlaku sejak tahun ajaran 2018-2019. *Ketiga*, aspek evaluasi. Saat ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya; 1) kurangnya sosialisasi penggunaan sistem dari manual ke online, 2) kurangnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pembiayaan, 3) kurangnya perangkat yang menunjang sistem pembiayaan.

¹¹Pipin Desniati. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor*. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) (Jakarta, 2019).

Junarsia, 2018, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlas Sungai Guntung*.¹² Tesis ini memfokuskan kepada a) manajemen pembiayaan dalam meningkatkan sarana prasarana di Madrasah Aliyah. b) faktor pendukung dan penghambat Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah. c) upaya yang dilakukan pihak Madrasah Aliyah dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Hasil penelitian a) perencanaan, tahapan ini tiga unsur yang menjadi asas, yakni *budgeting, accounting, dan auditing*. b) pengelolaan, dalam pengelolaan ini madrasah membagi 20% untuk triwulan 1, 40% untuk triwulan 2, 20% triwulan 3, dan 20% untuk triwulan 4. c) pengawasan, bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaan.

Selvia Marlina dan Junaidi, 2023, tesis dengan judul *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Selatan*.¹³ Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah swasta Piladang. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah (1) perencanaan pembiayaan pendidikan masih dalam penyesuaian dengan kebutuhan belajar siswa, dan prinsip perhitungan biaya satuan belum diterapkan secara keseluruhan; biaya pendidikan hanya ditentukan berdasarkan kesungguhan wali murid dalam musyawarah, sehingga alokasi biaya setiap komponen dalam rencana pembiayaan

¹²Junarisa, *Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Di Madrasah Aliyah Swasta Al-Iklas Sungai Guntung*. Tesis. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

¹³Selvia Marlina dan Junaidi: *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Selatan*. THAWALIB: Jurnal Kependidikan Islam. Vol. 4 No. 1. 2023

pendidikan ditata berdasarkan jumlah dana yang terkumpul; (2) Dana pendidikan digunakan untuk uang yang berasal dari biaya komite untuk mendukung komponen yang tidak dapat dibiayai dengan dana BOS. Pembukuan masih terbilang mendasar; (3) Setiap enam bulan, yayasan, panitia, dan pengajar mengawasi penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari iuran panitia (per semester). Mayoritas pengawasan hanya terfokus pada kondisi fisik dan pertumbuhan madrasah serta (4) Laporan pertanggungjawaban dibuat dengan cara meringkas seluruh penerimaan dan pengeluaran selama enam bulan sebelumnya serta melampirkan semua tagihan, kwitansi, dan bukti transaksi atas pengeluaran yang dikeluarkan.

Achmad Sholihun, 2020, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Muskhafiyah Semono dan At-Taqwa Jatinegara Kabupaten Kebumen*.¹⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menunjukkan hasil bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Muskhafiyah Semono dan At-Taqwa Jatinegara Kabupaten Kebumen di dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada pembiayaan pendidikan melibatkan masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan dengan menggunakan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan melalui tahapan pembiayaan yaitu: pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan

¹⁴Achmad Sholihun, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Muskhafiyah Semono dan At-Taqwa Jatinegara Kabupaten Kebumen*. Tesis. Program Studi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto. 2020.

kepentingan masyarakat yang berasaskan pada musyawarah mufakat. Kedua, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui penggerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, serta penjabaran program dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Ketiga, evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran belanja dan realisasi penggunaannya dengan prinsip transparansi anggaran. Persamaan penelitian Achmad dengan penelitian ini adalah pembahasan yang sama mengenai manajemen pembiayaan dan metode yang digunakan. Perbedaannya penelitian Achmad dan penelitian disini adalah tentang manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat sedangkan dalam penelitian ini membahas manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

Linda Rusiana, 2022, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Di Madrasah Menengah Kejuruan Negeri Darul Ulum Muncar Kabupaten Banyuwangi*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan hasil bahwa *budgeting* (perencanaan pembiayaan) di Madrasah Menengah Kejuruan Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi menggunakan empat perencanaan yaitu: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBS), Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAS), Rencana Kegiatan Jangka Panjang (RKJP), dan Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM). *Accounting* (pembukuan pembiayaan) di Madrasah Menengah Kejuruan Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi menggunakan

¹⁵Linda Rusiana. *Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Sara Prasarana Di Madrasah Menengah Kejuruan Negeri Darul Ulum Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Khas Jember. 2022.

empat dalam *accounting* yaitu: buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. *Auditing* (pelaporan pembiayaan), di Madrasah Menengah Kejuruan Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi menggunakan tiga pelaporan yaitu dilakukan setiap tiga bulan sekali, dilakukan setiap enam bulan sekali, dan dilakukan setiap satu tahun sekali. Persamaan penelitian Linda dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai manajemen pembiayaan dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya adalah penelitian Linda adalah tentang manajemen pembiayaan di Madrasah Menengah Kejuruan, sedangkan dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidiyah.

Faizah Indah Robbi, 2021, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten (Studi Kasus Di Pesantren Gratis Biaya)*.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan hasil bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan di lembaga tersebut meliputi penentuan rencana anggaran, sumber dananya dari donatur (tetap dan tidak tetap), dan penyusunan serta pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Pesantren. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan, meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Jenis pencatatan yang digunakan yaitu buku dan juga komputer. Evaluasi pembiayaan pendidikan yakni baru evaluasi internal saja. Evaluasi internal dilakukan oleh yayasan yang meliputi evaluasi bulanan dan tahunan, sedangkan untuk evaluasi eksternal belum dilaksanakan. Varian pembiayaannya ada operasional, personal dan investasi.

¹⁶Faizah Indah Robbi. *Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten (Studi Kasus Di Pesantren Gratis Biaya)*. Tesis. Madrasah Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen, 2021.

Faktor pendukungnya tingginya antusiasme donatur dalam mendonasikan dana. Faktor penghambatnya donatur baru yang belum terlalu paham dengan alur sistem pendonasian. Persamaan penelitian Faizah dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai manajemen pembiayaan dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya adalah penelitian Faizah adalah tentang manajemen pembiayaan di Pesantren, sedangkan dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah.

Eny Masruroh, 2019, tesis dengan judul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Studi Pada Pondok Pesantren (Wali Songo Ngabar)*.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan hasil bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, dilembaga tersebut meliputi penentuan rancangan anggaran, menentukan sumber dana, dan penyusunan serta pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Adapun Program peningkatan kualitas guru yang dilakukan diantaranya memperhatikan penyeleksian penerimaan guru, melakukan beberapa program pengembangan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Jenis pembukuan yang digunakan yaitu buku kas umum. Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru terdapat dua bentuk, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh yayasan yang meliputi evaluasi bulanan dan tahunan, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan

¹⁷Eny Masruroh. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Studi Pada Pondok Pesantren (Wali Songo Ngabar)*. Tesis. Pascasarjana IAIN Ponogoro, 2019.

oleh pemerintah. Persamaan penelitian Eny dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai manajemen pembiayaan dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya adalah penelitian Eny adalah tentang manajemen pembiayaan di Pesantren, sedangkan dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah.

Untuk memudahkan terkait penelitian dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan sajikan terkait beberapa persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Zaini, Kreativitas Manajemen Pembiayaan pendidikan pada Madrasah Marjinal di Kota Banjarmasin (Studi Multikasus pada MI Darul Huda Kuin dan MI Al-Istiqamah Pekapuran)</i>	Persamaan penelitian Zaini dan penelitian di sini adalah sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan	Perbedaan penelitian di atas dengan peneliti ini adalah bahwasanya Zaini melakukan penelitian tentang perencanaan pendidikan, penggunaan dana pendidikan, efektivitas, dan efisiensi dan pendidikan, fundrising dan pendidikan, akuntabilitas dana pendidikan. Sedangkan penelitian di sini adalah peneliti lebih fokus terhadap proses penyusunan anggaran pembiayaan, pembukuan, dan proses audit pembiayaan pendidikan.
2	Fakarotul Karimah, <i>Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (studi kasus di MI Tahfidz Ash-Habul Khafi Ngawi).</i>	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan.	Karimah memfokuskan kepada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap proses penyusunan anggaran, pembukuan, dan proses audit pembiayaan pendidikan.

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Pipin Dinasti, <i>Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor.</i>	Persamaan penelitian Pipin dan penelitian di sini adalah sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan.	Perbedaan penelitian di sini dengan penelitian di atas adalah peneliti lebih fokus terhadap proses penyusunan anggaran pembiayaan, pembukuan, dan proses audit pembiayaan pendidikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pipin Dinasti adalah berfokus pada implementasi perencanaan, pelaksanaan sistem manajemen pembiayaan. Pendidikan dan aspek evaluasi.
4	Zainudin Latif, <i>Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Swasta (Studi Multisitius Di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar Dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar).</i>	Persamaan penelitian Zainudin dan penelitian di sini adalah membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan.	Perbedaan penelitian yang dilakukan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Latif mengkaji tentang perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan manajemen pembiayaan pendidikan di SD Blitar. Sedangkan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana proses penyusunan anggaran pembiayaan, pembukuan, dan proses audit pembiayaan pendidikan.
5	Junarsia: <i>Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlas Sungai Guntung.</i>	Persamaan penelitian Junarsia dan penelitian di sini adalah sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan.	Perbedaan penelitian ini adalah tentang fokus penelitian Junarsia membahas manajemen pembiayaan dalam meningkatkan sarana prasarana di Madrasah Aliyah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada proses penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan pembiayaan pendidikan.

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
6	Selvia Marlina dan Junaidi: <i>Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Selatan.</i>	Penelitian di sini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan pendidikan.	Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Selvi dan Junaidi adalah tentang pengelolaan perencanaan pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana proses penyusunan anggaran pembiayaan, pembukuan, dan proses audit pembiayaan pendidikan.
7	Achmad Sholihun. <i>Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mushafiyah Semono dan At-Taqwa Jatinegara Kabupaten Kebumen.</i>	Persamaan penelitian adalah metode penelitian yang sama dan sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan.	Achmad membahas manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat di Taman Al-Qur'an, sedangkan Penelitian ini membahas manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.
8	Linda Rusiana. <i>Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Menengah Kejuruan Negeri Darul Ulum Muncar Kabupaten Banyuwangi.</i>	Persamaan penelitian adalah metode penelitian yang sama dan sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan	Perbedaan penelitian adalah Rusiana membahas tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Madrasah Menengah Kejuruan, sedangkan penelitian ini adalah membahas manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.
9	Faizah Indah Robbi. <i>Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten (Studi Kasus Di Pesantren Gratis Biaya)</i>	Persamaan penelitian adalah metode penelitian yang sama dan sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan	Perbedaan penelitian adalah Faizah membahas tentang manajemen pembiayaan di pondok pesantren, sedangkan penelitian ini adalah membahas manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
10	Eny Masruroh. <i>Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Studi Pada Pondok Pesantren (Wali Songo Ngabar)</i>	Persamaan penelitian adalah metode penelitian yang sama dan sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan	Perbedaan penelitian adalah Eny membahas tentang manajemen pembiayaan di pondok pesantren, sedangkan penelitian ini adalah membahas manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika. Adapun bab-bab yang tersusun terdiri dari:

Pertama bab I Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Kedua bab II Landasan Teori. Pada bab ini terdiri dari kajian teori yang berhubungan manajemen pembiayaan pendidikan dan kerangka pikir.

Ketiga bab III metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta uji keabsahan data.

Keempat bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. *Pertama*, hasil penelitian memuat tentang: gambaran objek penelitian, baik visi dan misi madrasah, struktur kepengurusan, data siswa, dan data pendidik. *Kedua*, pembahasan. Meliputi: 1) penyusunan rencana anggaran pembiayaan; 2) Pembukuan pembiayaan pendidikan; 3) Proses pemeriksaan

pembiayaan pendidikan. Ketiga, analisis data penelitian berisi: 1) Analisis data proses penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. 2) Analisis data proses pembukuan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. 3) Analisis data proses audit pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

Kelima bab V penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan keseluruhan dan saran-saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.